

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan lokasinya di Asia Tenggara, Indonesia berada di antara benua Australia dan Asia serta Samudera Hindia dan Pasifik. Karena banyaknya pulau, laut, dan selat yang ada di Indonesia, negara ini sering disebut sebagai negara kepulauan. Indonesia dengan 17.504 pulau dan luas laut 5,8 juta km² dengan bentang garis pantai sepanjang 81.000 km, dengan garis pantai yang panjang tersebut dan posisinya yang berada pada daerah khatulistiwa sangat menunjang berkembangnya ekosistem hutan mangrove (Kementrian LHK, 2020).

Hutan mangrove memiliki keragaman potensi yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat yang dirasakan masyarakat dapat berupa beragam produk dan jasa. Pemanfaatan produk dan jasa tersebut telah memberikan tambahan pendapatan serta hamper setiap hutan mangrove di seluruh wilayah pesisir Indonesia mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dengan luas sangat bervariasi bergantung bahkan merupakan penghasilan utama pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat (Joandani et al., 2019). Indonesia memiliki hutan mangrove seluas 20-25% dari keseluruhan ekosistem mangrove di dunia. Menurut KLHK, luas lahan yang dimiliki Indonesia adalah 3.36 juta hektar, dengan rincian sebagai berikut: Papua seluas 1.562.905 Ha, Sumatera seluas 660.445 Ha, Kalimantan

seluas 688.025 Ha, Maluku seluas 224.46 Ha, Jawa seluas 56.500 Ha, Bali-Nusa Tenggara seluas 39.974 Ha. Hutan mangrove memberikan kontribusi besar dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hutan mangrove diyakini memiliki kapasitas penyerapan karbon tiga sampai lima kali lebih baik daripada hutan tropis, tergantung pada kerapatan, besaran pohon, dan faktor lainnya. Hutan mangrove merupakan hutan yang tumbuh di daerah pasang surut terutama di daerah pesisir. Dalam Pasal 1 poin 1 Peraturan Presiden RI No. 73 Tahun 2012 tentang Strategis Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove menyatakan “Strategis Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang selanjutnya disingkat SNPEM adalah upaya dalam bentuk kebijakan dan program untuk mewujudkan pengelolaan ekosistem mangrove lestari dan masyarakat sejahtera berkelanjutan berdasarkan sumber daya yang tersedia sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional”. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas pembangunan di wilayah pesisir mengancam ekosistem hutan mangrove yang terus menurun. Tekanan ekologis terhadap ekosistem dan sumber daya pesisiran terus meningkat (Inhug, 2019).

Meningkatnya tekanan dapat mengancam keberadaan ekosistem dan sumberdaya pesisir. Ancaman besar bagi masyarakat pesisir adalah abrasi pantai. Abrasi terjadi akibat kerusakan yang disebabkan oleh gelombang dan arus laut. Abrasi yang terus-menerus dapat menyebabkan kerugian lahan dan merusak pemukiman. Alasan ketidakberhasilan dalam perlindungan hutan mangrove adalah rendahnya partisipasi stakeholder dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ekosistem mangrove. Dalam pengelolaan mangrove, peran dan keterlibatan komunitas sangat

penting (Inhug, 2019). Pengelolaan mangrove oleh masyarakat berbeda-beda di setiap wilayah sesuai dengan kondisi daerah dan masyarakatnya. Masyarakat menjadi faktor penentu dalam menjalankan dan berpartisipasi dalam pengelolaan hutan mangrove secara lestari (Febryano et al., 2014). Pada umumnya di masyarakat, pengetahuan lokal digunakan untuk melestarikan tanaman mangrove (Salampessy et al., 2015).

Secara geografis, wilayah laut Surabaya terletak di Selat Madura, namun secara substansi wilayah laut Surabaya adalah kawasan perairan di sebelah Timur dan Utara Kota Surabaya. Secara administratif, batas ke arah laut merujuk pada UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni sejauh empat mil atau sepertiga dari batas provinsi. Wilayah daratan yang berbatasan langsung dengan pantai atau laut terdiri dari 11 kecamatan yang meliputi: Kecamatan Benowo, Asemrowo, Krembangan, Pabean Cantikan, Semampir, Kenjeran, Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, dan Gununganyar. Hasil penelitian (Ecoton, 1996) menunjukkan bahwa kawasan mangrove di Pantai Timur Surabaya memiliki ketebalan sekitar 5-20 meter dan menutupi 8,7 km dari 28,5 km panjang garis pantai.

Di Surabaya terdapat dua ekosistem mangrove: Ekowisata Mangrove di Wonorejo dan Wisata Anyar Mangrove di Gunung Anyar. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009, ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 menjadi dasar berdirinya Ekowisata Mangrove Gunung Anyar. Ekosistem Mangrove

di Kota Surabaya telah mengalami kerusakan sebesar 40% dari total luas mangrove (Setyawan, 2006). Menurut data dari Dinas Pertanian Kota Surabaya (2011), terdapat penurunan luas lahan mangrove yang signifikan. Jumlah luas hutan mangrove yang mengalami penyusutan dari tahun 2010 hingga tahun 2011 adalah 20,47 ha. Penyusutan luas hutan mangrove terjadi di Kecamatan Rungkut, Kelurahan Wonorejo, sebesar 0,47 hektar per tahun. Pesisir Gunung Anyar adalah bagian dari kawasan konservasi di Kota Surabaya, yakni Pamurbaya atau pantai timur Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya telah membuat Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2007 yang mengatur tentang penetapan kawasan konservasi pantai timur Surabaya (PAMURBAYA) seluas 2.500 hektare. Salah satu contohnya adalah kawasan hutan mangrove Gunung Anyar. Luas hutan mangrove di Kelurahan Gunung Anyar Tambak adalah sebesar 47,9 ha. Hutan mangrove ini juga telah dikembangkan menjadi sumber perekonomian masyarakat dengan dijadikan sebagai kawasan pelestarian mangrove sekaligus kawasan ekowisata mangrove (Biro LHK, 2019)

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya, Kebun Raya Mangrove memiliki 57 dari 157 jenis mangrove yang ada di dunia. Kebun Raya Mangrove Surabaya telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk wisata edukasi mangrove, jalur jogging sepanjang 630 meter, menara pengamat setinggi 12 meter, dermaga perahu, area piknik, dan wisata perahu. Sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 93 Tahun 2019, kebun raya menjadi pusat konservasi eksitu atau pelestarian di luar habitat aslinya. Selain itu, juga

berperan sebagai konservasi insitu untuk berbagai biodiversitas atau keanekaragaman hayati.

Kawasan hutan mangrove Gunung Anyar terletak di pantai berlumpur yang bertepatan dengan Selat Madura. Wilayah daratan Kawasan Mangrove Gunung Anyar didominasi oleh kegiatan perikanan, nelayan, usaha kecil menengah (UKM) bakau, dan ekosistem hutan mangrove. Sementara itu, wilayah perairannya terbatas untuk aktivitas penangkaran ikan. Ekosistem mangrove memainkan peran penting dalam mendukung kehidupan masyarakat di wilayah pesisir, baik secara ekonomi maupun ekologi. Pada aspek ekonomi, mangrove digunakan untuk arang, kayu bakar, alat tangkap ikan, dan buahnya dapat dimanfaatkan sebagai perasa minuman. Dari sudut pandang ekologis, mangrove memainkan peran sebagai penyedia bahan humus untuk makanan hewan invertebrata (Sutrisno, 2015).

Menurut Raharjana (2012), peran masyarakat sangat penting dalam mendukung pembangunan pariwisata. Sementara itu, peran pemerintah dan swasta terbatas pada memfasilitasi masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengembangan objek wisata. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki kendali penuh atas proses pengembangan pariwisata, termasuk dalam perencanaan, pengelolaan, implementasi, dan evaluasi. Keterlibatan masyarakat lokal sangat penting dalam pengembangan pariwisata karena mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang potensi wilayah mereka. Masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka bukan hanya objek atau penerima manfaat, tetapi juga subjek pembangunan. Potensi pariwisata perlu didorong melalui keterlibatan

masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam sektor pariwisata tidak hanya membangun industri pariwisata yang berkembang, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hubungan ini menciptakan keseimbangan mutualisme yang positif. Menurut Basri (2019), perkembangan industri pariwisata memberikan manfaat multi ganda bagi Negara secara tidak langsung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa salah satu tujuan pariwisata adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011. Suherla (2022) menyatakan bahwa pembangunan sektor pariwisata bertujuan untuk mencapai pariwisata yang berkualitas, berbasis masyarakat, berkelanjutan, dan mendukung pembangunan pariwisata daerah yang memperhatikan pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Oleh karena itu, partisipasi langsung masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan pariwisata tersebut.

Potensi SDA dan SDM yang ada sangat mendukung pengembangan pariwisata untuk mendukung perekonomian masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan pariwisata bukan hanya berarti pengarahan tenaga kerja masyarakat secara sukarela, tetapi justru lebih penting adalah tergerakannya masyarakat untuk mau

memanfaatkan kesempatan-kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidupnya dan juga melestarikan lingkungan disekitarnya secara bersamaan.

Pada pertengahan tahun 2023 Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar Surabaya diambil alih oleh Pemkot Surabaya dibawah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) dan diserahkan kepada UPTD Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar Surabaya sehingga seluruh pengambilan keputusan tidak langsung melalui masyarakat dan masyarakat kurang berpartisipasi secara langsung melalui keputusan, namun masyarakat dapat berpartisipasi melalui cara lain seperti, partisipasi ide, tenaga, dan materi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “Analisis partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan wisata Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar Surabaya “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan wisata di Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar, Surabaya ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelestarian dan pengembangan wisata di Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui partisipasi masyarakat saat ini terhadap Mangrove Gunung Anyar
2. Untuk Mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelestarian dan pengembangan wisata di hutan mangrove Gunung Anyar

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam menambah atau memperluas wawasan keilmuan pembaca dalam pembahasan Hutan Mangrove dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau ide dalam pengembangan wisata Hutan Mangrove Gunung Anyar.

b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengelola wisata Kawan Hutan Mangrove Gunung Anyar serta memberi informasi terhadap masyarakat lokal dan pelaku pariwisata tentang dampak pariwisata.